

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh:

Kintan Mariani

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan yang dilarang serta diancam pidana. Salah satu kasus tindak pidana pelecehan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah perkara pidana dengan studi Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk, didasarkan terdapat tindak pidana, unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan sehingga meniadakan alasan pemaaf dengan Putusan pidana penjara 8 (delapan) tahun. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan dengan mempertimbangkan secara aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Kintan Mariani

Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan kepada Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan pembuktian melalui pemeriksaan kejiwaan pelaku yang dilakukan secara komprehensif dan objektif guna memastikan penerapan unsur kemampuan bertanggung jawab secara tepat, serta mencerminkan keadilan substantif serta menghindari kesalahan penerapan alasan pemaaf maupun pembenar. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan optimal bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan Seksual, Gangguan Kejiwaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN WITH MENTAL DISORDERS (Study of Decision Number: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)

By:

KINTAN MARIANI

Sexual harassment is an unlawful act committed for sexual gratification while violating moral decency, which is prohibited and punishable by law. One of the sexual harassment cases that will be examined in this thesis is the criminal case with Study Decision Number 657/Pid.B/2024/PN.Tjk involving a defendant who sexually harassed a woman with a mental disorder. The issues in this study are the criminal liability of perpetrators of sexual harassment against women with mental disorders and the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties on perpetrators of sexual harassment against women with mental disorders.

The methods used in compiling this thesis are the normative legal approach and the empirical legal approach. The sources and types of data used consisted of primary and secondary data. The research sources consisted of judges from the Tanjung Karang Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection methods used were literature study and field study. The data analysis used was qualitative analysis

The results of the research and discussion show that the criminal liability of the perpetrator in Decision Number: 657/Pid.B/2024/PN Tjk is based on the existence of a criminal act, the element of responsibility, and the existence of the element of fault in the form of intent, thereby negating the grounds for acquittal, resulting in a criminal sentence of 8 (eight) years' imprisonment. The judge's consideration in imposing the sentence used Article 285 of the Criminal Code as the legal basis for punishment, taking into account legal, philosophical and sociological aspects.

The recommendation in this study is that law enforcement officials, in carrying out their duties, should always prioritize evidence obtained through comprehensive and objective psychiatric examinations of perpetrators in order to ensure the proper application of the element of responsibility, reflect substantive justice, and avoid the erroneous application of exculpatory or justifying grounds.

Kintan Mariani

It is hoped that judges, in passing sentences, will consider legal, philosophical, and sociological aspects in order to achieve legal certainty, justice, and optimal protection for victims.

Keywords: Criminal Responsibility, Sexual Harassment, Mental Disorder.